ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 45/PHPU.D-VIII/2010 TENTANG DISIKUALIFIKASI DAN PENETAPAN PEMENANG PILKADA KOTA WARINGIN BARAT

Oleh : **Daniel Hotma Mangapul**

Pembimbing I :

Pembimbing II :

Alamat :

Email : @gmail.com Telepon :

Abstract

The decision of the Constitutional Court Number 45/PHPU.D-VIII/2010 decided to win one of the candidate pairs, namely the Ujang-Bambang pair and disqualify the Sugianto-Eko Soemarno pair as the winner of the West Kotawaringin election. The authority of the Constitutional Court in deciding disputes over general election results is regulated in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on these problems the authors are interested in knowing first, what is the authority of the Constitutional Court in deciding disputes over the results of the regional head elections No.45/PHPU.D - VIII/2010 Concerning the Disqualification and Determination of Winners of the West Waringin City Election, are they in accordance with their authority as regulated in Article 24 C paragraph (1) of the 1945 Constitution? Second, what are the implications of the decision of the Constitutional Court No. 45/PHPU.D-VIII/2010 on voter sovereignty in determining Regional Heads in West Kotawaringin Regency?

This type of research is classified as normative legal research with the type of legal principles. In normative legal research, the data source is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The collection of normative legal research data uses data collection techniques using library research. The data obtained through the literature study will be analyzed qualitatively. In drawing conclusions the author uses a deductive method of thinking, namely a way of thinking that draws conclusions from a general statement or proposition into a specific statement.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that, firstly, the Constitutional Court Decision Number 45/PHPU.D-VIII/2010 concerning the General Election Dispute for the Regional Head of West Kotawaringin Regency, the Constitutional Court has decided beyond the petition submitted by the applicant and decided beyond the authority of the Constitutional Court, namely decided to disqualify the winning pair for the West Kotawaringin election, namely the H. Sugianto and H Eko Soemarno, SH and set Dr. H. Ujang and Iskandar ST., M.Si as the elected Regent and Deputy Regent. Second, the issuance of this decision itself has its own impact on the implementation of the West Kotawaringin post-conflict local election. The West Kotawaringin election has become unclear. In this case, the KPUD has not implemented the decision of the Constitutional Court. The grace period for implementing the decision and anomalies in the provisions of the law. The law stipulates that the Constitutional Court's decision has permanent legal force since it has been pronounced in a plenary session which is open to the public, so from that moment on, the decision must be implemented. In fact, it is impossible for the Constitutional Court's decision to be followed up immediately after the decision is read. It takes process and time to follow up on decisions.

Keywords: Constitutional Court – Pilkada – Kota Waringinbarat

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

PENDAHULUAN

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi menimbulkan persoalan tersendiri dalam melaksanakan tugasnya dalam memutus perselisihan Pemilu. Hal ini tidak terlepas daripada putusan-putusan MK yang keluar dari jalur-jalur prosedur hukum.

Hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang baru menggantikan peran Mahkamah Agung membawa harapan baru dalam tercapainya rasa keadilan. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu untuk menyelesaikan sengketa perselisihan pemilu ini.

Akan tetapi banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan perdebatan. Salah satunya dapat terlihat dalam penyelesaian sengketa pemilu Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini menjadi satusatunya putusan yang belum dilaksanakan. Hal itu dikarenakan pihak KPUD berada dalam dilema yang besar. Dilain sisi KPUD merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu dan menetapkan pemenangnya berdasarkan perolehan suara terbanyak serta dilain sisi KPUD harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pelaksanaan pemilu Kotawaringin Barat ini dilaksanakan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati. Pemilu ini sendiri diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yakni 1. Pasangan Sugianto-Eko Soemarno sedangkan pasangan ke 2. Pasangan Ujang-Bambang. Dalam rapat pleno penetapan pemenang pemilu Kotawaringin Barat diputuskan bahwa pemenang pemilu adalah pasangan Sugianto-Eko Soemarno. Perolehan suara yang diperoleh pasangan Sugianto-Eko Soemarno adalah 67.199 suara, sedangkan pasangan Ujang-Bambang memperoleh 55.281 suara.

Pasangan Ujang-Bambang merasa tidak puas akan putusan KPUD tersebut. Pasangan tersebut akhirnya menggugat KPUD Kotawaringin Barat di Mahkamah

Konstitusi. Setelah melaksanakan persidangan dengan memeriksa alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengagetkan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 itu memutuskan memenangkan salah satu pasangan calon yaitu pasangan Ujang-Bambang dan mendiskualifikasi pasangan Sugianto-Eko Soemarno sebagai pemenang pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membatalkan keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPUD.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan bahwa salah satu pasangan calon telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Akibatnya Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon tersebut dan Mahkamah Konstitusi selanjutnya memenangkan pasangan calon lain. Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Hukum Acara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah adalah rekapitulasi hasil perhitungan suara yang mempengaruhi suara pasangan calon lain. Mengenai aspek pelanggaran bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan putusan tersebut.

Selain itu dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa bentuk amar putusan berupa: 1. Permohonan tidak dapat diterima; 2. Permohonan dikabulkan dengan menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Mahkamah Konstitusi; 3. Permohonan ditolak. Dari bentuk amar putusan tersebut jelas tidak ada yang mengatur mengenai mendiskualifikasi pasangan calon atau secara langsung menetapkan pemenang pemilu itu sendiri. Dalam hal penetapan suara yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak salah dalam menetapkan perolehan suara yang benar. Masyarakat sebagai pemilih

dan pemilik suara yang syah tentu sudah pintar dan bijak dalam memilih kepala daerah mereka. Jangan sampai penetapan suara yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi bumerang. Hal itu bisa saja Mahkamah Konstitusi melanggar hak pilih dari masyarakat itu sendiri.

Berbicara mengenai kewenangan Mahkamah konstitusi hal tersebut sangat jelas diuraikan dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 yang menyatakan “*Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya di berikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum*”.¹

Melihat hal tersebut Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan terkadang melebihi wewenang yang dimilikinya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final tersebut dapat menjadi cacat dan terjadi pro dan kontra dimana putusan tersebut keluar dari substansi permasalahan yang terjadi. Melihat fenomena yang seperti ini dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstistusi mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu kepala daerah ini. Tidak hanya yang telah diatur dalam Undang-Undang melainkan kewenangan diluar itu juga dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atas dasar keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tak melihat apakah kewenangan itu telah sesuai dengan yang telah diamanatkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul “*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang*

***Disikualifikasi Dan Penetapan Pemenang Pilkada Kota Waringin Barat*”.**

B. Rumusan Masalah

- 1) Apakah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah No.45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Disikualifikasi Dan Penetapan Pemenang Pilkada Kota Waringin Barat sudah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945?
- 2) Bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PHPU.D-VIII/2010 terhadap kedaulatan pemilih dalam menentukan Kepala Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah No. 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Disikualifikasi Dan Penetapan Pemenang Pilkada Kota Waringin Barat sudah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945.
- b. Untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PHPU.D-VIII/2010 terhadap kedaulatan pemilih dalam menentukan Kepala Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau. Serta penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya terkait masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi maupun masukan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 ayat (1)

bagi peneliti selanjutnya untuk melaksanakan penelitian, juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat khususnya terkait dengan menganalisis suatu putusan hakim.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi para penegak hukum dalam menimbang suatu putusan.

D. Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian yang disusun dalam skripsi yang berjudul “Independensi Dan Akuntabilitas Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Pemilu Kepala Daerah Lebak Banten (Analisis Putusan MK No. 111/PHPU.DXI/2013)” yang disusun oleh Eka Sari Saputri, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta Tahun 2014, Kedua, Penelitian yang disusun dalam skripsi yang berjudul “Penghapusan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Sengketa Pemilukada (Analisis Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013)” yang disusun oleh Jentel Chairnosia, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta Tahun 2011,

Ketiga, dalam buku karya Veri Junaidi yang berjudul “Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator”. Keempat, penelitian oleh Dian Agung Wicaksono dan Ola Anisa Ayutama dalam Jurnal *Rechtvinding* Volume 4, Nomor 1, April 2015 dengan judul “Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah dalam Menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supermasi hukum untuk

menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Lahirnya konsep negara hukum yang dikemukakan oleh F.J. Stahl adalah konsep pemikiran negara hukum Eropa Kontinental atau yang dipraktekkan di negara-negara Eropa Kontinental (*Civil Law*). Adapun konsep pemikiran negara hukum yang berkembang di negara-negara Anglo-Saxon yang dipelopori oleh A.V. Decey (dari Inggris) dengan prinsip *rule of law*. Konsep negara hukum tersebut memenuhi 3 (tiga) unsur utama.²

- 1) Supermasi aturan-aturan hukum (*Supremacy of the law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*Absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum ;
- 2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*Equality before the law*), Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat ;
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di Negara lain dengan Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

2. Teori Konstitusi

Konstitusi dengan istilah lain *Constitution* atau *Verfassung* dibedakan dari Undang-Undang Dasar atau *Grundgesetz*. Dalam suatu kekhilafan pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, maka pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum dirulis, demi mencapai kesatuan hukum kesederhanan hukum dan kepastian hukum. Begitu besarnya pengaruh paham kodifikasi hukum, sehingga setiap peraturan hukum karena

² Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.57-58

pentingnya itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang-Undang Dasar.³

3. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat lahir pada saat terjadinya revolusi di Prancis yang menentang kekuasaan raja yang mutlak dan berusaha menghancurkannya, mengambil alih pengertian kedaulatan itu seluruhnya dan memproklamirkan kedaulatan tersebut kepada rakyat, dan disinilah mulai dikembangkan ajaran kedaulatan rakyat. Teori ini lahir secara kontroversial dalam panggung politik sejarah kekuasaan Negara. Ide dasarnya sangat sederhana, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara, Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri.

F. Kerangka Konseptual

- 1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.⁴
- 2) Diskualifikasi adalah larangan untuk bertanding atau berkompetisi bagi seseorang atau sebuah regu yang melanggar aturan-aturan yang menyatakan tidak cakap atau tidak mampu, pencabutan hak, dan hal yang tidak memenuhi syarat.⁵
- 3) Sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta

Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.⁶

- 4) Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

G. Metode Penelitian

1) Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian/ pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian tersebut bersifat deskriptif

2) Sumber Data

Dalam penulisan jenis penelitian normatif sumber data yang digunakan merupakan data sekunder. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu :⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang

³ Moh.Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 64

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

⁵ Peter Salim Dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1999, hlm 75.

⁶<http://m.hukumonline.com/klik/detail/lt5c4533ec18aa6/perbedaan-sengketa-proses-dengan-sengketa-hasil-pemilu/> diakses pada tanggal 29 April 2021 Pukul 21.00 Wib

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

⁸ *Ibid*, hlm.13

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;

- d) Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum 5. PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pemilukada) Kota Waringin Barat;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku yang berhubungan dengan putusan disparitas, hasil-hasil penelitian terdahulu, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3) **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis normatif akan diperoleh melalui studi dokumen Studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan

dan pembuktian suatu kejadian⁹ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama studi kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.¹⁰

4) **Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dalam pengertian apa yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan. Menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang umum kepada hal yang khusus berdasarkan teori yang ada

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

1. Pengetian Demokrasi

Demokrasi bersal pada kata “demos” dan “cratos” yang berarti “kekuasaan yang ada pada rakyat seluruhnya” untuk membedakan dengan bentuk pemerintahan oligarki, kekuasaan yang ada pada sedikit orang dan monarki kekuasaan yang ada pada sedikit orang.¹¹

2. Prinsip-Prinsip Demokrasi

- 1) Lembaga legeslatif/parlemen sebagai wakil rakyat;
- 2) Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit;
- 3) Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang;
- 4) Pers sebagai alat kontrol masyarakat;

3. Model-Model Demokrasi

⁹ Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm.149.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 252

¹¹ Jenedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Op. Cit. hlm. 14

- a) David Heid mengemukakan demokrasi terdiri dari 5 model, yaitu:12
- 1) Demokrasi klasik
 - 2) Republika protektif
 - 3) Republikanisme
 - 4) Demokrasi protektif
 - 5) Demokrasi developmental.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilu

. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.¹³

2. Tujuan, Asas dan Fungsi Pemilu

Ketentuan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jo Pasal 22 undang undang nomor 8 tahun 2012 menjelaskan bahwa asas dari pada pemilu ialah pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilu mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan konsep negara demokrasi, pemilu merupakan cara yang sangat efektif untuk menciptakan sistem politik yang demokratis. Dimana pemilu mampu mengikut sertakan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya secara langsung untuk menduduki jabatan strategis lembaga negara. Berikut 3 fungsi pemilu yang berkaitan secara erat satu sama lain:¹⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Kedaulatan Rakyat

1. Definisi Kedaulatan Rakyat

Istilah kedaulatan rakyat merupakan perpaduan antara dua kata yaitu kata “kedaulatan” dan kata “rakyat”, di mana masing-masing kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Dari segi kaidah Bahasa Indonesia kata kedaulatan berasal dari suku kata “daulat” yang bermakna kekuasaan: pemerintahan. Kemudian kata tersebut mendapat imbuhan awalan “ke” dan akhiran “an” (ke-daulat-an) sehingga mempunyai suatu pengertian kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara.¹⁵ Selanjutnya, kata “rakyat” berarti segenap penduduk suatu negara (sebagai imbalan pemerintahan).¹⁶

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah No.45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Disikualifikasi Dan Penetapan Pemenang Pilkada Kota Waringin Barat

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilihan umum diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Lebih lanjut, ketentuan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengamanatkan bahwa perselisihan tentang hasil perolehan suara pemilu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Tata cara pelaksanaan penyelesaian perselisihan perolehan hasil suara dalam pilukada telah diatur dalam Peraturan Mahkamah

12 Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 208

13 M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991, hlm. 2.

14 Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, *Op. Cit.* hlm. 68.

15 Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 27

16 *Ibid*

Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan Pemilukada.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, menggelar pemungutan suara dalam rangka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) pada tanggal 5 Juni 2010. Pemilu tersebut diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu H. Sugianto (Calon Bupati) dan H. Eko Soemarno, S.H. (Calon Wakil Bupati) dengan Nomor urut satu, dan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. (Calon Bupati) dan Bambang Purwanto, S.ST. (Calon Wakil Bupati) dengan Nomor urut dua.

Rekapitulasi perhitungan suara dimenangkan oleh Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 67.199 suara (54,87%) dari 122.480 suara sah, dan Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 55.281 suara (45,13%) yang dimuat dalam Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 dan Sesuai dengan hasil SK Nomor 63//KptsKPU-020.435792/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010.

Akibat keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut tidak dapat diterima oleh Pasangan Calon Nomor urut 2, Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si., dan Bambang Purwanto, S.ST dan selanjutnya mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi agar MK membatalkan SK tersebut.

Sebagai lembaga negara yang bertugas mengawal, menjaga, dan

memelihara konstitusi, di dalam setiap tindakan dan pengambilan Putusan, MK harus mendasarkan kepada UUD 1945. Hal tersebut ditegaskan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan :

“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.”¹⁷

Dilihat dari sudut peraturan perundang-undangan, tidak ditemukan satu pun undang-undang atau peraturan yang **secara eksplisit** menyebutkan bahwa MK berwenang atau tidak berwenang mendiskualifikasi pasangan Calon dalam Pemilukada. Baik UUD 1945 maupun UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hanya menyebutkan bahwa

*”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk... **memutus perselisihan hasil pemilihan umum**”.*

Karena yang menjadi objek perselisihan adalah hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan pasangan calon, baik berpengaruh untuk mengikuti putaran kedua maupun untuk menjadi calon terpilih maka segala sesuatu yang dinilai dapat memengaruhi akan dipertimbangkan oleh MK, termasuk proses penyelenggaraan Pemilukada. ”Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun

17 Pasal 45 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif¹⁸, demikian salah satu pertimbangan MK dalam memutus kasus Kotawaringin Barat.¹⁸

Dalam konteks ini, Akil Mochtar, salah seorang hakim MK, mengatakan, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada Pemilu pada Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dengan sistematis, terstruktur, dan masif. Hal ini mengancam prinsip Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, demi tegaknya hukum, perlu pemulihan keadilan. Kemenangan Pasangan Nomor Urut 1 harus dibatalkan. Pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran sangat serius.¹⁹

Pelanggaran-pelanggaran yang dinilai MK sangat serius dan membahayakan demokrasi serta mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilu pada yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1, antara lain adalah: 1. memberikan uang atau sembako (*money politic*) yang dilakukan secara masif meluas di seluruh kecamatan se Kabupaten Kotawaringin Barat; 2. menekan, mengancam, mengintimidasi, dan meneror, tidak hanya kepada rakyat biasa tetapi juga kepada beberapa kepala desa sehingga masyarakat tidak bisa memilih dengan bebas sesuai dengan pilihan hati nuraninya; 3. menjanjikan sesuatu yang tidak masuk akal kepada masyarakat, yaitu akan membagikan lahan seluas 2 hektar per orang jika pasangan tersebut terpilih.

Setelah mempelajari lebih jauh kasus ini, penulis berpendapat, apa yang dilakukan oleh MK tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Putusan itu sah dan dapat dibenarkan dengan beberapa alasan sebagai berikut. *Pertama*, MK berwenang memutus sengketa hasil Pemilu. Sengketa hasil Pemilu bukan hanya perselisihan tentang perolehan suara, tetapi juga faktor-faktor yang dapat memengaruhi perolehan suara tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, suara yang diperoleh Pasangan Nomor Urut 1 didapat melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perolehan suara itu tidak benar dan oleh karenanya dinyatakan batal oleh MK. *Kedua*, karena yang diputus oleh MK adalah hasil Pemilu, putusannya tidak harus selalu berupa penetapan angka-angka yang diperoleh masing-masing kandidat. Putusan tersebut bisa saja berbentuk pembatalan calon apabila terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan bahwa calon yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang sangat serius dan suara yang diperolehnya didapat dengan cara-cara yang ilegal.

Ketiga, berdasarkan bukti dan keterangan saksi di persidangan, pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 sudah sangat serius. Tidak saja memenuhi unsur TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif), tetapi juga disertai dengan tekanan, ancaman, intimidasi, dan teror yang meresahkan masyarakat. Dalam penilaian MK, apa yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 sudah terencana dan meluas di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Karena itu, jika tidak didiskualifikasi

18 Putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PHPU.D-VIII/2010

19 *Kalau Cuma Selisih Suara tidak Usah ke MK*, Wawancara Anggota MK, Akil Mochtar, Koran

Media Indonesia, Jakarta, Kamis, 15 Juli 2010, hlm. 2, kolom 3-5.

dandilakukan pemungutan suara ulang, potensi terjadinya pelanggaran serupa sangat besar. Pemungutan suara ulang tidak akan menghasilkan Pemilukada yang sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tetapi hanya membuang tenaga dan memboroskan uang negara. *Keempat*, tindak pidana Pemilukada memang diputus oleh peradilan umum. Dengan demikian, seharusnya masalah pidana sudah selesai sebelum KPU setempat menetapkan hasil perolehan suara dan pasangan calon terpilih. Dalam kasus Kotawaringin Barat hal ini tidak terjadi. Bahkan, sampai perkara masuk ke MK, tidak ada proses peradilan pidana terkait dengan kasus ini di Pengadilan Negeri setempat. UU Nomor 32 Tahun 2004 sendiri tidak secara tegas memberikan alokasi waktu penyelesaian tindak pidana Pemilukada. Ini berbeda dengan Pemilu anggota legislatif. UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 257 ayat (1) menegaskan, "*Putusan pengadilan terhadap kasus pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional*".²⁰

Kelima, apabila pelanggaran pidana diproses di peradilan umum sesudah perkara masuk ke MK atau sesudah terungkap ada pelanggaran pidana dalam persidangan MK baru diproses di peradilan umum, penyelesaiannya memerlukan waktu yang lama untuk menghasilkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht*), sementara di dalam mengadili perkara Pemilukada, MK dibatasi oleh waktu; paling lama 14 hari kerja sejak permohonan mengenai perselisihan hasil

Pemilukada dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, vonis sudah harus dijatuhkan.²¹

Keenam, tidak ada UU yang melarang MK mendiskualifikasi calon. Putusan MK mendiskualifikasi calon setelah terbukti calon tersebut melakukan pelanggaran yang serius merupakan terobosan hukum para hakim MK di dalam menginterpretasi UU. Terobosan hukum dan interpretasi terhadap UU merupakan hak hakim. Karenanya, tindakan ini dapat dibenarkan dan sah demi hukum.

Ketua MK, Moh. Mahfud MD, mengatakan, keputusan untuk menetapkan langsung pemenang Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat karena setelah pemenangnya didiskualifikasi pasangan calonnya tinggal satu, sehingga terjadi dilema hukum. Kalau akan pemungutan suara ulang, tentu tidak bisa karena hanya satu pasangan calon yang tersisa. Tetapi, kalau akan diproses dari awal lagi dengan membuka pendaftaran baru, berarti melanggar undang-undang. Maka berdasar kewenangan Pasal 77 UU MK kami memutuskan untuk menetapkan pemenang Pemilu.²² Akil Mochtar, salah seorang hakim MK, mengatakan, karena kemenangan Pasangan Nomor Urut 1 sudah dibatalkan, Mahkamah dihadapkan pada masalah hukum yang dilematis. Kalau hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang, dapat terjadi masalah di kemudian hari. KPU Kotawaringin Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilukada, karena calon hanya dua pasang. Karena MK menganggap Pemilukada Kotawaringin Barat dilaksanakan tidak normal karena melanggar prinsip Pemilu yang dijamin dalam konstitusi maka MK memutuskan

20 Pasal 257 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

21 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (1),

22 *Minta Fatwa ke MA? Monggo, silahkan*", Wawancara Ketua MK, Mahfud MD, Harian Seputar Indonesia, Senin 19 Juli 2010, hlm. 2, kolom 2-

untuk menetapkan Pasangan Nomor Urut 2 sebagai pemenang.²³

B. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PHPU.D-VIII/2010 terhadap kedaulatan pemilih dalam menentukan Kepala Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menempatkan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Pemilihan umum adalah mekanisme yang digunakan untuk memberikan mandat kepada penyelenggara negara sebagai pelaksana kekuasaan negara. Pemilihan umum yang digunakan untuk memberikan mandat kepada penyelenggara negara sebagai pelaksana kekuasaan negara tersebut tanpa melihat bagaimana sistem yang diterapkan dalam pemilihan umum. Adapun, untuk menilai apakah pemilihan umum itu benar-benar telah dijadikan sebagai media pelaksana kedaulatan rakyat dapat dilihat dari sistem yang diterapkan.

Pemahaman tentang rakyat dalam kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, dan menempatkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Ajaran kedaulatan rakyat sebagai ajaran yang terakhir dipraktikkan pada negaranegara modern mendapatkan tempat yang baik, karena ajaran kedaulatan rakyat dapat dianggap sebagai ajaran yang terbaik selain ajaran kedaulatan yang lainnya. Oleh karena rakyat berdaulat atau berkuasa, maka segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat.

Kedaulatan rakyat yang berarti rakyat yang berkuasa, oleh karena rakyat suatu negara yakni kumpulan manusia yang mempunyai persamaan antara lain persamaan asal usul, persamaan kehormatan/perasaan, persamaan daerah

tempat tinggal atau pencarian rezeki, persamaan kepentingan atau kebutuhan, persamaan pikiran atau maksud.²⁴ Rakyat yang berkumpul dan hidup bersama merasa perlu memilih pemimpin atau wakilnya mereka secara bersama untuk menentukan kehidupan mereka bersama, sehingga dilaksanakanlah pemilihan.

Konsep kedaulatan rakyat yang berarti rakyat yang mempunyai kedaulatan atau kekuasaan, yang berarti konsep kekuasaan rakyat atau kedaulatan yang demikian tidak bersifat mutlak. Menurut Masdar F. Mas'udi: Kedaulatan sebagai konsep kekuasaan (sovereignty) untuk mengatur kehidupan ada yang bersifat terbatas (muqayyad), relatif (nisby) dan ada yang tak terbatas (ghair muqayaad) atau mutlak (absout). Kedaulatan absolut adalah kedaulatan atas semua kedaulatan yang tidak dibatasi oleh kedaulatan pihak lain. Kedaulatan absolut hanya milik Allah SWT, untuk mengatur alam semesta melalui hukum alam-Nya dan mengatur kehidupan manusia melalui sinyal-sinyal hukum moral yang diilhamkan kepada setiap nurani (qalb) manusia atau diwahyukan melalui para nabi dan rasul-Nya, sedangkan dalam negara sebagai bangunan sosial dan proyek peradaban yang direkayasa oleh manusia dalam wilayah tertentu yang berdaulat adalah manusia secara kolektif sebagai khalifah-Nya.²⁵

Pancasila di dalamnya berisi nilai-nilai dasar atau nilai-nilai fundamental. Di sini yang dimaksudkan adalah bahwa nilai-nilai yang terdapat di dalam rumusan sila-sila Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang mengandung pengertian abstrak dan universal. Nilai-nilai itu adalah nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan bangsa,

²³ Kalau Cuma Selisih Suara tidak Usah ke MK", Wawancara Anggota MK, Akil Mochtar, Koran Media Indonesia, Jakarta, Kamis, 15 Juli 2010, hlm. 2, kolom 3-5.

²⁴ Kasman Singodimedjo, Masalah Kedaulatan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), cet. Pertama, h. 39.

²⁵ Masdar Farid Mas'udi, Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Alfabeta, 2010), h. 47

nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial.²⁶

Agar nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat diwujudkan hendaknya eksistensinya dijadikan sebagai sumber inspirasi dan menjadi penuntun ke arah yang hendak dituju oleh hukum nasional. Oleh karena itu, hukum nasional hendaknya secara hakiki memuat sikap menjunjung tinggi agama, moral, etika, harkat dan martabat manusia; mencerminkan jiwa dan rasa keadilan manusia dan masyarakat; dan disusun dengan berpedoman pada pandangan hidup dan kepribadian serta aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.²⁷

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilihan umum diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Tata cara pelaksanaan penyelesaian perselisihan perolehan hasil suara dalam pemilukada telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan Pemilukada. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat, Mahkamah Konstitusi telah memutus melebihi permohonan yang diajukan pemohon dan memutus di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu memutus untuk mendiskualifikasi pasangan pemenang pemilukada Kotawaringin Barat yaitu Pasangan H. Sugianto dan H Eko Soemarno,SH dan menetapkan Pasangan Dr.H.Ujang dan Iskandar ST.,M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Penetapan pemenang pemilukada yang seharusnya berdasarkan perolehan suara terbanyak menjadi kewenangan KPU/KPUD bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah Kotawaringin Barat ini mempunyai implikasi dengan didiskualifikasinya salah satu pasangan calon, Selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya dilain pihak menetapkan pasangan lain sebagai pemenang pemilukada. Keluarnya putusan ini sendiri mempunyai dampak tersendiri terhadap pelaksanaan pemilukada Kotawaringin Barat. Pemilukada Kotawaringin Barat ini menjadi tidak jelas. Pihak KPUD dalam hal ini belum melaksanakan putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut. Tenggang waktu pelaksanaan putusan dan anomali ketentuan undang-undang. Undang-undang menegaskan bahwa putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, sehingga sejak saat itu pula putusan tersebut harus dilaksanakan. Padahal tidak mungkin putusan Mahkamah Konstitusi ditindaklanjuti sesaat

26 Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Lukman Offset, 1999), hlm. 87-90; Paulus Wahana, *Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 72-75.

27 Abdul Bari Azed, "Aliran *Sociological Jurisprudence* dan Cita-cita Pancasila di Bidang Hukum", dalam Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: Remaja Karya CV, 1989), hlm. 93-94.

seketika setelah putusan itu dibacakan. Dibutuhkan proses dan waktu untuk menindaklanjuti putusan. Hal ini terutama yang membutuhkan instrumen hukum baru dalam bentuk revisi atau bahkan undang-undang baru, padahal pembentukan undang-undang berkarakter formal prosedural. Artikulasi putusan final putusan Mahkamah Konstitusi pada konstitusi tidak diikuti dengan klausul mengikat, karena dinilai telah mengandung makna tersebut secara implisit, padahal lumrahnya, klausul final selalu diikuti dengan kata mengikat (final and binding). Karena itu, tanpa menafikan makna implisit yang telah terkandung di dalamnya, klausul mengikat juga penting untuk dicantumkan secara eksplisit, sebagai ikhtiar menciptakan kepastian hukum, sekaligus meminimalisir kemungkinan putusan yang hanya akan menjadi macan kertas dengan kekuatan simbolik yang menghiasi berita negara.

B. Saran

1. Karena Putusan MK dalam masalah PPHU bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan, KPU Kotawaringin Barat sebagai penyelenggara Pemilu disarankan agar melaksanakan Putusan itu secara konsekuen. KPU sebaiknya tidak mengomentari atau menginterpretasi Putusan tersebut, apalagi mengarah kepada upaya untuk tidak mengeksekusi. Jika Putusan MK tidak dieksekusi, bukan saja tindakan itu merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga akan menjadi preseden buruk bagi putusan-putusan PPHU yang lain. Tidak mustahil KPU akan ditekan oleh pihak tertentu untuk tidak mengeksekusi sebuah putusan karena sudah ada contoh sebelumnya.
2. Untuk mengurangi polemik terhadap Putusan-Putusan MK, terutama

terkait dengan ruang lingkup objek PPHU, disarankan agar MK menyempurnakan Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan memuat secara eksplisit objek PPHU yang meliputi juga proses penyelenggaraan Pemilukada yang dapat memengaruhi hasil, seperti politik uang, tekanan/intimidasi, pengerahan PNS, dan kecurangan-kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azed, Abdul Bari, 1989, "Aliran *Sociological Jurisprudence* dan Cita-cita Pancasila di Bidang Hukum", dalam Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Karya CV, Bandung.
- Budiarjo, Mariam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta.
- Komariah, Aan, Djam'an Satori, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- Mas'udi, Masdar Farid , 2010, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Alvabet.
- Sukarja, Ahmad, 2012, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Surbekti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta.
- Widodo, Heru, 2018, *Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika di Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Budiana, Nyoman, 2009, *Reinterpretasi Sistem*

- Pemilu Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi PKK Fakultas Hukum Universitas Patimura*, vol, II, No. 1, Juni.
- Hoesiin, Zainal Arifin, 2010, “Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, Nomor 6, Desember.
- Indra, Mexsasai, 2014, “Konsepsi Kedaulatan Rakyat dalam Cita Hukum Pancasila”, *Jurnal Selat*, Volume 1 Nomor 2.
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tim Prima Pena, Gita Media Press.
- Kasim, Ifdhal, 2000, “Mempertimbangkan ‘Critical Legal Studies’ dalam Kajian Hukum di Indonesia”, *Jurnal Wacana*, Vol 6.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta.
- Noorwahidah, 2011, Sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat , *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 1, Februari.
- Notonagoro,1980, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: CV. PanjuranTudjuh.
- Nurtjahjo, Hendra, 2008, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Syahuri, Taufiq Qurahman, 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2003, *Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Bengkulu*, Vol. II, No. 1, Juni.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum 5. PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Waringin Barat;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi menjadi Undang-undang
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD